

**ANALISIS ANGGARAN BELANJA MODAL SEBAGAI ALAT PENGENNDALIAN
PADA KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

OLEH:

NAMA : SRI HARTINAH
NPM : 1505170668
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : SRI HARTINAH
NPM : 1505170668
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS ANGGARAN BELANJA MODAL SEBAGAI ALAT
PENGENDALIAN PADA KANTOR DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH SUMATERA UTARA

Dinyatakan : (C/B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

E. EKA NURMALIA SARI, SE, M.Si, Ak, CA)

Penguji II

(KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, SE, M.Si)

Pembimbing

(IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : SRI HARTINAH
N.P.M : 1505170668
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS ANGGARAN BELANJA MODAL SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN PADA KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

(IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

ABSTRAK

SRI HARTINAH, NPM. 1505170668. Analisis Anggaran Belanja Modal Sebagai Alat Pengendalian Pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Tahun 2019.

Penelitian yang dilakukan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis realisasi belanja modal tidak mencapai anggaran yang telah di tetapkan pada DPRD Sumatera Utara, Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang menyebabkan anggaran belanja modal tidak tercapai, untuk mengetahui dan menganalisis anggarn belanja modal sebagai alat pengendalian.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif, berupa hasil wawancara dan anggaran dan realisasi belanja modal dari tahun 2014 sampai tahun 2017, teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan survey ketempat penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis data untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori untuk mendukung masalah.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Realisasi anggaran belanja modal pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara belum habis di realisasikan dan kurang efektif. Realisasi anggaran belanja modal pada kator Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara belum mencapai target hal ini disebabkan kendala yang dihadapi saat realisasi belanja modal adalah apabila ada rasionalisasi atau pengurangan anggaran untuk digeser ke anggaran berdasarkan kebijakan Pembrov-SU dalam hal ini kepala daerah. Fungsi anggaran sebagai alat pengendalian belanja modal pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara belum dijalankan dengan baik hal ini disebabkan oleh bebrapa faktor, antaranya adalah terlambatnya pengesahaan perubahan APBD dimana banyak belanja yang ditampung pada P. APBD.

Kata Kunci: Anggaran, Realisasi, Pengendalian, Belanja Modal

KATA PENGANTAR



Assalammualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sastra 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu : “Analisis Anggaran Belanja Modal Sebagai Alat Pengendalian Pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara”.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan skripsi. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar- besarnya terutama kepada:

1. Teristimewa terima kasih untuk kedua orang tua saya, ayah Selamat Riadi dan Ibunda tercinta saya Herlina S yang telah mengasuh dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang serta mendidik dan mendukung peneliti dalam pembuatan skripsi ini. Dan seluruh keluarga besarku yang telah banyak memberikan dukungan moril, materi dan spiritual kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri S.E., M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, SE. M.Si selaku sekretaris program studi Akuntansi.
8. Bapak Ikhsan Abdullah, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
9. Ibu Dr Eka Nurmalasari SE., Ak, M.Si. Ac selaku pembimbing akademik selama penulis berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dan pengalaman

kepada peneliti, serta seluruh staff pegawai Fakultas Ekonomi yang telah membantu peneliti baik selama masa pelaksanaan maupun dalam penyusunan skripsi ini.

11. Kepada sahabat-sahabat saya Lisa, Doni, Peni, Sri, Tri, Ummi dan Sulastri yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
12. Kepada teman-teman peneliti yang ada di kelas I Akuntansi pagi Universitas Sumatera Utara stambuk 2015.
13. Kepada adik-adik tersayang yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, peneliti hanya bisa berharap semoga Alalh SWT membalas kebaikan kalian semua. Amin.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini dari semua pihak.

Akhirnya atas segala bantuan serta motivasi yang diberikan kepada peneliti dari berbagai pihak selama ini, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Peneliti tidak dapat membalasnya kecuali dengan doa dan puji syukur kepada Allah SWT dan salawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat memperluas cakrawala

pemikiran kita dimasa yang akan datang dan berharap sekripsi ini dapat menjadi lebih sempurna kedepannya.

Wassalammualaikum, Wr.Wb

Medan, Maret 2019

Penulis

SRI HARTINAH
NPM:1505170668

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
 BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis.....	8
1. Keungan Daerah.....	8
a. Pengertian Keungan Daerah.....	8
b. Ruang Lingkup Dari Keungan Daerah.....	8
2. Anggaran.....	9
a. Pengertian Anggaran.....	9
b. Jenis-jenis Anggaran Dan proses Penyusunan Anggaran	10
c. Tujuan Dan Manfaat Anggaran.....	12
d. Kelemahan Anggaran.....	15
e. Unsur-unsur Anggaran Dan Belanja Daerah.....	16
3. Laporan Realisasi Anggran.....	17
a. Pengertian Laporan Realisasi Anggran.....	17
4. Belanja Modal.....	19
a. Pengertian Belanja Modal.....	19
b. Kriteria Belanja Modal.....	22
5. Pengendalian.....	23
a. Pengertian Pengendalian.....	23
b. Jenis Pengendalian.....	27
c. Fungsi Pengendalian Anggaran.....	28
6. Penelitian Terdahulu.....	30
B. Kerangka Berfikir.....	32
 BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	34

B. Defenisi Operasional Variabel.....	34
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
D. 5Jeni sdan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	39
B. Pembahasan.....	42

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL**Halaman**

Tabel I.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pada DPR Sumatera Utara.	2
Tabel I.2 Interpensi Kriteria Efektivitas.....	4
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel III.1 Waktu Penelitian.....	37
Tabel IV.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pada DPR Sumatera Utara	39
Tabel IV.2 Interpensi Kriteria Efektivitas.....	40

DAFTAR GAMBAR**Halaman**

Gambar II.1 Kerangka Berfikir.....	33
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas berbantuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Kedua Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Agar tujuan-tujuan dalam otonomi daerah dapat tercapai, pemerintah haruslah bertindak efektif dan efisien dalam mengelola keuangan daerahnya. Untuk memberikan jaminan dialokasikannya sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif, maka diperlukan informasi akuntansi manajemen, seiring dengan adanya paradigma baru organisasi pemerintahan yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat dan kepentingan publik.

Anggaran merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Anggaran terdiri dari beberapa jenis diantaranya adalah anggaran

belanja langsung dan belanja tidak langsung. Anggaran belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja barang dan jasa merupakan bagian penting dalam kegiatan operasional pemerintahan karena bersifat rutin atau terjadi terus menerus. Belanja ini penting karena belanja barang dan jasa berkaitan dengan pembiayaan pemerintahan secara keseluruhan. Biaya-biaya ini dikeluarkan dalam rangka pengawasan dan pemberian jasa-jasa kepada setiap fungsi pemerintahan.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Permasalahan yang dihadapi DPR Sumatera Utara adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana yang digunakan untuk masing-masing program kegiatan. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Berikut adalah data anggaran dan realisasi belanja modal pada DPR Sumatera Utara.

Tabel I.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pada DPR Sumatera Utara

Tahun	Anggara	Realisasi	Persentase
2014	6.405.406.250	5.532.630.00 0	86,37
2015	929.900.000	767.518.000	82.54
2016	13.239.590.00 0	1.618.568.88 7	12.23

2017	4.371.983.355	3.103.541.250	70.99
------	---------------	---------------	-------

Sumber : DPR SUMUT

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa anggaran anggaran belanja modal yang di buat tidak habis di realisasikan. Diamana anggaran belanja modal pada tahun 2015 menurun drastis dari tahun 2014 kemudian pada tahun 2016 meningkat drastis dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2017 menurun dan diikuti oleh peningkatan realisasi.

Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah, namun adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat (Putro 2010).

Pemerintah daerah membutuhkan dana untuk melaksanakan pembangunan, dimana pembiayaan tersebut berasal dari APBD. Searah dengan adanya otonomi daerah maka daerah-daerah harus mengelola keuangan daerahnya secara baik. Oleh karena itu pengelolaan keuangan yang di lakukan dengan efisien dan efektif harus dilakukan secara optimal, karena hal ini berkaitan dengan target dan realisasi penerimaan daerah, dan ternyata realisasi seringkali tidak sesuai dengan target. karena hal ini berkaitan dengan dana pembangunan. Kalau pengelolaan keuangannya sudah efisien dan efektif ini berarti bahwa adanya suatu jaminan ketersediaan dana pembangunan, dan kalau pengelolaannya belum efisien dan efektif maka perlu untuk didorong lagi agar supaya pengelolaannya akan lebih membaik dan ini akan menjamin ketersediaan dana untuk pembangunan itu

sendiri, sehingga hal ini akan menjamin kemandirian keuangan daerahpun semakin lama semakin membaik. (Cicilia, 2015)

Dengan mengetahui perbandingan hasil target anggaran dan realisasi penerimaan daerah, maka tingkat efektivitas pengelolaan keuangan pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara di berikan penilaian dengan menggunakan kriteria penilaian berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun sebagai berikut :

Tabel I.2
Interpensi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara pada tahun 2014-2015 dapat di kata gorikan cukup efektif akan tetapi pada tahun 2016 masuk dalam katagori tidak efektif dan pada tahun 2017 di katagorikan kurang efektif. Menurut Mardiasmo (2013, hal 105) “organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan”.

Hal ini akan menyebabkan menurunnya produktivitas masyarakat dan juga akan menyebabkan berkurangnya jumlah investor yang melakukan investasi yang akan mengurangi pendapatan asli daerah. Menurut Abimanyu (2015) apabila belanja modal meningkat maka akan berdampak pada produktivitas masyarakat

yang semakin meningkat dan bertambahnya jumlah investor yang melakukan investasi akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya Hijrah Novianti Simamora (2018) dengan judul Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sebagai Alat Pengawasan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selisih yang terjadi disebabkan oleh anggaran belanja daerah lebih besar daripada anggaran pendapatan daerah yang menimbulkan ketidakefektifan dan efisiensi dalam penyusunan anggaran tetapi anggaran sudah digunakan sebagai alat pengawasan untuk menilai kinerja keuangan

Terdapat perbedaan dari penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu. Peneliti terdahulu membahas tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sebagai Alat Pengawasan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sumatera Utara sedangkan penulis memilih meneliti Analisis Anggaran Belanja Modal Sebagai Alat Pengawasan Pada Kantor Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Utara.

Berdasarkan adanya ketidaksesuaian antara teori dan kenyataan, maka penulis tertarik mengangkat judul skripsi yaitu **“Analisis Anggaran Belanja Modal Sebagai Alat Pengendalian Pada Kantor Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Utara”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalahnya yaitu adalah:

1. Terjadinya penurunan anggaran belanja modal pada tahun 2015 dan tahun 2016.
2. Masih kurang efektifnya realisasi anggaran belanja modal pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara..

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan permasalahan, yaitu:

1. Mengapa realisasi belanja modal tidak mencapai anggaran yang telah ditetapkan pada DPRD Sumatera Utara.
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan anggaran belanja modal tidak tercapai.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis realisasi belanja modal tidak mencapai anggaran yang telah ditetapkan pada DPRD Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang menyebabkan anggaran belanja modal tidak tercapai.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini akan bermanfaat:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan referensi, serta dapat menambah informasi sumbangan pemikiran dan kajian tentang analisis piutang tidak tertagih yang dapat digunakan untuk masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini penulis diharapkan dapat mempraktekkan teori yang diperoleh dan dapat mengaplikasikannya dilapangan.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengembangkan teori dan melaksanakan penelitian yang lebih mendalam atau sebagai bahan pembanding.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Keuangan Daerah

a. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Halim (2014, hal. 11), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

b. Ruang Lingkup Dari Keuangan Daerah

Ruang lingkup keuangan daerah merupakan semua unsur keuangan atau kekayaan yang menjadi tanggung jawab daerah.

Adapun ruang lingkup dari keuangan daerah menurut Halim (2012, hal. 20) ada dua yaitu :

- 1) Keuangan daerah yang dikelola langsung, meliputi :
 - a) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
 - b) Barang-barang inventaris milik daerah
- 2) Kekayaan daerah yang dipisahkan, meliputi :
 - a) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Adapun arti dari keuangan daerah itu sendiri yaitu pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut, Halim (2012, hal. 20).“Sedangkan alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah yaitu tata usaha daerah yang terdiridari tata usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang lebih dikenal dengan akuntansi keuangan daerah.”

Telah dijelaskan diatas bahwa keuangan daerah adalah pengorganisasian kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang di inginkan daerah tersebut, sedangkan akuntansi keuangan daerah sering diartikan sebagai tata buku atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistimatis dibidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu untuk menghasilkan informasi aktual di bidang keuangan.

2. Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua

aktivitas perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh sebab itu rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga bisa diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

Menurut Sasongko (2011, hal. 2) "Penyusunan anggaran berurusan dengan masa depan. Tujuan penyusunan anggaran perusahaan adalah memprediksi tingkat aktivitas operasi dan keuangan perusahaan dimasa mendatang".

Anggaran mengharuskan manajemen untuk merencanakan kegiatan di masa yang akan datang untuk mengembangkan arah keseluruhan organisasi, melihat kemungkinan timbulnya masalah, dan untuk pengembangan kebijakan masa yang akan datang

Harahap (2011, hal 15) mendefinisikan anggaran sebagai berikut:

"Sebagai suatu konsep yang membantu manajemen dalam mencapai tujuan upaya menuangkannya secara tertulis, sasaran yang akan dicapai suatu perusahaan mulai dari sasaran utama, sasaran khusus, sampai rincian dan penyebabnya. Rencana ini dituangkan dalam bentuk kuantitatif mulai dari jangka panjang sampai dengan jangka pendek tahunan bahkan dirinci dalam periode yang lebih singkat. Budget inilah yang menjadi kerangka tujuan yang akan dicapai dan menjadi pedoman manajemen semua eselon untuk mencapai tujuan organisasi".

b. Jenis-jenis Anggaran Dan Proses Penyusunan Anggaran

Jenis anggaran ada berbagai macam hal itu sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan dalam melakukan kegiatan.

Menurut Supriyono (2013, hal. 65) anggaran dapat dikelompokkan dari beberapa sudut pandang, sebagai berikut:

- 1) Menurut dasar penyusunan
 - a) Anggaran variabel (*Variable budget*)
 - b) Anggaran tetap (*Fixed budget*)
- 2) Menurut cara penyusunan
 - a) Anggaran periodik (*Periodic budget*)
 - b) Anggaran kontinu (*Continuous budget*)
- 3) Menurut jangka waktu
 - a) Anggaran jangka pendek (*Short range budget/anggaran taktis*)
 - b) Anggaran Jangka Panjang (*Long range budget/anggaran strategis*)
- 4) Menurut bidangnya
 - a) Anggaran operasional (*Operational budget*)
 - b) Anggaran keuangan (*Financial budget*)
- 5) Menurut kemampuan menyusun
 - a) Anggaran komprehensif (*Comprehensive budget*)
 - b) Anggaran parsial (*Partially budget*)
- 6) Menurut fungsinya
 - a) Anggaran apropriasi (*Appropriation budget*)
 - b) Anggaran kinerja (*Performance budget*)
- 7) Menurut metode penentuan harga pokok produk
 - a) Tradisional (*Traditional budget*)
 - a) Anggaran berdasar kegiatan (*Activity based budget*)

Dari jenis-jenis anggaran diatas dapat dilihat bahwa anggaran itu terbagi dalam beberapa bagian, penyusunan anggaran ini dilakukan sesuai dengan pola tujuan yang telah disusun pada saat perusahaan didirikan. Perusahaan didirikan

tidak hanya dengan jangka satu tahun atau dua tahun saja, karena perusahaan perlu menyusun perencanaan yang menyeluruh tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam waktu tertentu. Dari jenis-jenis anggaran ini kita dapat mempertimbangkan anggaran-anggaran yang harus dibuat oleh perusahaan.

c. Tujuan dan Manfaat Anggaran

Anggaran merupakan suatu sistem sangat penting untuk mendukung keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Tanpa adanya perencanaan penyusunan dan penerapan anggaran yang baik, maka pihak manajemen tidak akan dapat mengarahkan langkah perusahaan dengan efektif dan efisien.

Menurut Catur (2011, hal 3) anggaran mempunyai tujuan-tujuan yang terkait dengan penyusunannya yaitu:

1) Sebagai alat perencanaan

Sebagai alat perencanaan anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan. Sebagai contoh, anggaran penjualan melihatkan kepada manajemen adanya kenaikan target penjualan pada cabang A dan penurunan pada cabang B berdasarkan informasi tersebut, manajemen segera mengambil langkahlangkah perencanaan dengan mengalihkan tenaga penjual ke cabang A dan meningkatkan kegiatan promosi pada cabang B untuk meningkatkan penjualan cabang B.

2) Sebagai Alat Koordinasi

Anggaran dapat mempermudah koordinasi bagian-bagian didalam perusahaan, berikut ini adalah contoh kegunaan anggaran, khususnya anggaran penjualan untuk koordinasi antar departemen yang ada

diperusahaan. Setelah anggaran penjualan selesai dibuat, departemen pemasaran dapat segera berkoordinasi dengan departemen sumber daya manusia untuk menentukan kecukupan jumlah staf di departemen pemasaran agar mampu memenuhi target penjualan. Selanjutnya departemen pemasaran juga berkoordinasi dengan departemen keuangan tentang anggaran pemasaran. Pada waktu yang bersamaan, departemen produksi dapat segera menentukan jumlah kebutuhan jumlah bahan baku untuk memproduksi barang jadi agar dapat memenuhi target penjualan. Kemudian, departemen produksi mengusulkan pembelian bahan baku ke departemen pembelian dan departemen keuangan. Selanjutnya, departemen keuangan dapat menghitung kebutuhan dana yang diperlukan untuk menunjang kelancaran kegiatan penjualan.

3) Sebagai Alat Motivasi

Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan. Sebagai contoh, jika anggaran penjualan memperlihatkan angka penjualan tertentu yang harus dicapai maka tenaga penjual yang ada dip perusahaan dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang banyaknya barang jadi yang harus dijual. Jika dapat target yang jelas, maka tenaga penjual akan lebih termotivasi untuk mencapainya dibandingkan tanpa adanya target. Tenaga penjual akan termotivasi lagi jika mereka juga dilibatkan dalam penyusunan anggaran penjualan.

4) Sebagai Alat Pengendalian

Keberadaan anggaran diperusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktifitas-aktifitas yang dilaksanakan didalam perusahaan. Misalnya, perusahaan menetapkan anggaran biaya telepon untuk setiap departemen sebesar Rp. 2.500.000 per bulan. Setiap awal bulan berikutnya, diadakan perbandingan antara biaya telpon yang aktual dikeluarkan oleh setiap departemen dengan target biaya yang ditentukan sebelumnya. Jika biaya pemakaian aktual berbeda dengan yang telah dianggarkan, maka harus dicari faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut dan dilakukan tindakan perbaikan agar pemakaian biaya telepon dibulan-bulan berikutnya sesuai dengan yang di anggarkan.

Selain mempunyai tujuan anggaran yang telah dibuat anggaran juga mempunyai beberapa manfaat.

Manfaat anggaran menurut Supriyono (2013, hal. 83) yaitu :

- 1) Perencanaan kegiatan organisasi atau pusat pertanggungjawaban dalam jangka pendek.
- 2) Membantu mengkoordinasikan rencana jangka pendek.
- 3) Alat komunikasi rencana kepada berbagai manajer pusat pertanggung jawaban.
- 4) Alat untuk memotivasi para manajer untuk mencapai tujuan pusat pertanggung jawaban yang dipimpinnya.
- 5) Alat pengendalian kegiatan dan penilaian prestasi pusat-pusat pertanggung jawaban dan para manajernya.

6) Alat pendidikan para manajer.

Penjelasan mengenai manfaat anggaran dapat dilihat sebagai berikut : anggaran sebagai alat perencanaan jangka pendek dan merupakan kesanggupan manajer pusat pertanggung jawaban untuk melaksanakan program atau bagian dari program dalam jangka pendek, anggaran sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit yang ada di dalam organisasi agar dapat bekerja secara selaras ke arah pencapaian tujuan, dalam penyusunan anggaran berbagai unit dan tingkatan organisasi berkomunikasi dan berperan serta dalam proses anggaran, anggaran yang penyusunannya mengikut sertakan peran serta para pelaksana dapat digunakan untuk memotivasi mereka di dalam melaksanakan rencana dan mencapai tujuan dan sekaligus untuk mengukur prestasi mereka, anggaran sebagai alat pengendalian kegiatan karena anggaran yang sudah disetujui merupakan komitmen dari para pelaksana yang ikut berperan serta di dalam penyusunan anggaran tersebut, dan anggaran juga sebagai alat untuk mendidik manajer mengenai bagaimana bekerja secara terinci pada pusat pertanggung jawabannya.

d. Kelemahan Anggaran

Banyak manfaat yang diperoleh dengan menyusun anggaran, akan tetapi masih terdapat beberapa kelemahan yang membatasi anggaran. Kelemahan-kelemahan anggaran menurut Supriyono (2013, hal. 95) antara lain:

- 1) Estimasi dan proyeksi tidak tepat.
- 2) Kondisi dan asumsi berubah.
- 3) Tidak ada kerja sama dan koordinasi.
- 4) Dipandang sebagai pengganti pertimbangan manajemen.

Kelemahan anggaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Ketidaktepatan estimasi anggaran mengakibatkan manfaat perencanaan tidak dapat tercapai, kondisi dan asumsi yang mendasari anggaran berubah maka perencanaan dan anggaran harus dikoreksi, anggaran berfungsi sebagai alat manajemen hanya jika semua pihak terutama manajer bekerja sama secara terkoordinasi dan berusaha mencapai tujuan, anggaran tidak dapat dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajemen dan pertimbangan manajemen

e. Unsur-unsur Anggaran Dan Belanja Daerah

Seperti halnya pada pemerintahan pusat, pada pemerintahan daerah, pengurusan keuangan daerah juga diatur dengan membaginya menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus. Dengan demikian pada pemerintahan daerah terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pengurusan umum-nya dan kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada pengurusan khususnya. Bagian ini akan menjelaskan secara singkat APBD sebagai inti pengurusan umum keuangan daerah.

APBD berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud (Mamesah, 1995, hal. 20) Definisi tersebut merupakan pengertian APBD pada orde baru.

APBD adalah suatu anggaran daerah. Kedua definisi APBD diatas menunjukkan bahwa suatu anggaran daerah termasuk APBD memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci
- 2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-beban sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-beban yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- 3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- 4) Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

3. Laporan Realisasi Anggaran

a. Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah (pusat atau daerah), yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggaran dalam suatu periode tertentu.

Standar Akuntansi Pemerintahan (2010, hal. 70) menyebutkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-

sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut :

- 1) Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 2) Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap komponen dalam LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut atas angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Namun dari segi struktur, LRA Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki struktur yang berbeda. Perbedaan ini

lebih diakibatkan karena adanya perbedaan sumber pendapatan pada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyusunan dan penyajian LRA didasarkan pada akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan-LRA, akuntansi belanja, akuntansi surplus/ defisit, akuntansi pembiayaan dan akuntansi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SiKPA), yang mana berdasar pada basis kas.

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislative dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Manfaat Laporan Relisasi Anggaran yaitu untuk menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

4. Belanja Modal

a. Pengertian Belanja Modal

Belanja modal merupakan suatu pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga akan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu. Dalam hal tersebut masuk ke dalam

pembukuan akuntansi dengan kata lain belanja modal akan mempengaruhi posisi keuangan

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Halim (2012, hal. 73) mendefinisikan Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan Abdullah (2012), Belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap

Adapun jenis - jenis belanja yang dapat dikategorikan kedalam lima kategori utama kegiatan belanja modal menurut Syaiful (2013), Menurut Perdirjen Perbendaharaan belanja modal dipergunakan untuk antara lain sebagai berikut :

1) Belanja Modal Tanah.

Belanja modal tanah adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau pembelian atau pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang- barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku- buku dan jurnal ilmiah.

b. Kriteria Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

- 1) Aset tetap mempunyai ciri-ciri / karakteristik sebagai berikut :
berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material. Sedangkan ciri-ciri / karakteristik Aset Lainnya adalah : tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material.
- 2) Aset tetap mempunyai ciri-ciri / karakteristik sebagai berikut :
berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material. Sedangkan ciri-ciri / karakteristik Aset Lainnya adalah : tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material.

5. Pengendalian

a. Pengertian Pengendalian

Pengendalian merupakan kegiatan yang bertujuan agar strategis, kebijakan, program kerja, dan anggaran dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Artinya semua kegiatan harus diusahakan sekecil mungkin adanya penyimpangan. Pengendalian harus dilakukan sepanjang proses bisnis agar setiap penyimpangan yang terjadi dapat diatasi.

Pengendalian menurut Halim (2012, hal. 5) adalah “merupakan usaha manajemen untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan dengan melakukan perbandingan secara terus-menerus antara pelaksanaan dengan rencana

Pengendalian merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengendalikan, mengawasi dan

mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengendalian dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para karyawan.

Sedangkan menurut Garrison (2013, hal. 20) pengendalian adalah “ proses mengumpulkan umpan balik untuk memastikan bahwa rencana telah dijalankan atau dimodifikasi dengan tepat sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi”.

Berdasarkan uraian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa pengendalian merupakan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan dalam organisasi terhadap komponen organisasi dan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara terus menerus dan berkesinambungan agar semua dapat berfungsi secara maksimal sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang dilaksanakan untuk dapat mengetahui apakah kegiatan telah dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya, apakah di dalam pelaksanaan terjadi hambatan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Penyimpangan dan pemborosan dengan adanya system pengendalian yang dibuat di dalam suatu program perusahaan dapat membantu untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan perusahaan.

Setiap kegiatan di dalam perusahaan harus selalu diawasi jika manajemen ingin tetap berada pada batas-batas ketentuan yang telah digariskan. Hasil nyata dari setiap kegiatan dibandingkan dengan rencana, dan bila terdapat perbedaan besar, dapat diambil tindakan perbaikan. Proses pengendalian dalam dunia usaha selalu memasukan manusia sebagai pengambil keputusan, informasi sebagai dasar

diambilnya tindakan pengendalian mencakup sebagian besar informasi keuangan, dan kegiatan pengendalian dilakukan secara periodik dan tidak terus-menerus.

Pengendalian merupakan fungsi terakhir yang harus dijalankan dalam manajemen. Dengan pengendalian dapat diketahui hasil yang telah dicapai oleh sebuah perusahaan. Cara yang dilakukan adalah dengan membandingkan segala sesuatu yang dijalankan dengan rencana, serta melakukan perbaikan bilamana terjadi penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan.

Seperti yang dikemukakan oleh Siregar dkk (2013, hal.6) bahwa pengendalian adalah : “usaha sistematis yang dilakukan manajemen untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, pengendalian dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan rencana dan mengambil tindakan yang perlu untuk menghilangkan berbagai penyimpangan”.

Maka kesimpulannya adalah bahwa pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting. Karena pengendalian menjadi salah satu faktor berhasilnya suatu program dari suatu perencanaan dan dapat dilihat para ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang fungsi manajemen serta menempatkan unsur pengendalian sebagai fungsi yang penting.

Berikut ini beberapa contoh utama yang memerlukan pengendalian secara baik menurut Hery (2014, hal.13) yaitu :

- 1) Pengupahan dan penggajian
- 2) Pemesanan dan pembelian barang
- 3) Pengiriman dan penjualan barang
- 4) Penerimaan dan pembayaran kas
- 5) Penyimpanan barang dagangan di gudang

6) Penanganan atas aset tetap

Berikut ini penjelasan dari contoh utama yang memerlukan pengendalian secara baik :

1) Pengupahan dan penggajian

Pengendalian ini dijalankan dengan tujuan untuk memastikan bahwa uang kas perusahaan dikeluarkan memang untuk membayar karyawan yang sah, yang sesuai tarif upah/gaji yang berlaku dan jumlah jam kerja actual karyawan. Pengendalian ini juga dibutuhkan untuk menghindari terjadinya karyawan fiktif.

2) Pemesanan dan pembelian barang

Pengendalian ini dijalankan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pemesanan dan pembelian barang memang telah dilakukan sesuai prosedur. Pengendalian disini dibutuhkan untuk menghindari terjadinya penggelapan/penyelewengan oleh oknum karyawan tertentu atas besarnya potongan pembelian yang diperoleh dari supplier.

3) Pengiriman dan penjualan barang dagang

Pengendalian ini dijalankan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengiriman dan penjualan barang dagangan memang telah dilakukan sesuai prosedur. Pengendalian disini juga dibutuhkan untuk menghindari terjadinya penjualan fiktif.

4) Penerimaan dan pembayaran kas

Pengendalian ini dijalankan dengan tujuan untuk memastikan bahwa kas telah diterima dengan baik/semestinya oleh perusahaan, serta memastikan bahwa pengeluaran kas hanya dilakukan untuk membayar

beban perusahaan yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, serta untuk menghindari terjadinya pembayaran berganda.

5) Penyimpangan barang dagangan di gudang

Pengendalian ini dijalankan dengan tujuan untuk memastikan bahwa barang dagangan telah aman tersimpan di gudang.

6) Penanganan atas asset tetap

Pengendalian ini dijalankan dengan tujuan untuk memastikan bahwa asset tetap yang dimiliki perusahaan telah digunakan sebagaimana mestinya dan hanya untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan sehari-hari.

Oleh karena itu, anggaran beban operasional sebagai alat pengendalian dapat bermanfaat untuk menilai realisasi dengan program anggaran yang telah ditetapkan dan diupayakan selalu sejalan dengan yang tertuang di dalam anggaran.

b. Jenis Pengendalian

Fungsi pengendalian (*controlling*) dalam [manajemen](#) adalah fungsi yang paling terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat lah penting dan sangat menentukan keberlangsungannya proses manajemen, karena harus di lakukan dengan sebaik baiknya

Menurut Welsch, (2012, hal. 14) pengendalian terbagi menjadi beberapa jenis yaitu :

- 1) Pengendalian awal
- 2) Pengendalian berjalan
- 3) Pengendalian umpan balik

Dibawah ini merupakan penjelsan dari jenis pengendalian :

- 1) Pengendalian awal Dipergunakan sebelum kegiatan atau tindakan dilaksanakan untuk menjamin bahwa sumber daya manusia dan bahan baku telah disiapkan dan perusahaan telah siap untuk melaksanakan kegiatan.
- 2) Pengendalain berjalan (biasanya dalam bentuk laporan kinerja berkala) pemantauannya (dengan menggunakan observasi personal dan laporanlaporan) terhadap aktivitas berjalan untuk menjamin bahwa tujuan dapat dicapai dan kebijakan serta prosedur telah diterapkan dengan benar selama operasi perusahaan.
- 3) Pengendalian umpan balik Tindakan pasca operasi (*ex-post-action*) memfokuskan pada hasil periode sebelumnya untuk mengendalikan aktivitas dimasa yang akan datang.

c. Fungsi Pengendalian Anggaran

Sebagai bagian dari fungsi pengendalian (*controlling*), anggaran berguna sebagai alat penilaian apakah aktivitas setiap bagian organisasi telah sesuai dengan rencana atau tidak. Dalam hal ini anggaran berfungsi sebagai standar/tolok ukur manajemen. Sebagai standar anggaran digunakan untuk menilai kegiatan yang dilaksanakan setiap bagian manajemen telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak. Jika realisasi pelaksanaan setiap bagian manajemen lebih baik dari anggaran, maka dapat dinilai bahwa bagian tersebut telah berhasil mencapai rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Rudianto (2013, hal. 67) dalam fungsi pengendalian, anggaran memiliki beberapa manfaat yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yaitu :

- 1) Berperan sebagai tolok ukur atau standar bagi kegiatan organisasi

- 2) Memberikan kesempatan untuk menilai dan mengevaluasi secara sistematis setiap segi atau aspek organisasi.

Mendorong pihak manajemen secara dini mengadakan penelaahan terhadap masalah yang dihadapi. Karena itu sebagai alat perencanaan dan pengendalian, anggaran memiliki fungsi dan manfaat yang saling terkait serta terintegrasi satu dengan lainnya. Satu manfaat dengan manfaat lainnya saling melengkapi.

6. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mendapat ide dan pengetahuan dari penelitian terdahulu yang beragam. Penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1	Hijrah Novianti Simamora (Skripsi (2018))	Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sebagai Alat Pengawasan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sumatera Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa selisih yang terjadi disebabkan oleh anggaran belanja daerah lebih besar daripada anggaran pendapatan daerah yang menimbulkan ketidakefektifan dan efisiensi dalam penyusunan anggaran tetapi anggaran sudah digunakan sebagai alat pengawasan untuk menilai kinerja keuangan
2	Sari Jurnal Vol 3 (2018)	Anggaran Belanja Daerah Sebagai Alat Pengendalian Pada Badan Pengolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bombana.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Realisasi anggaran biaya (Belanja) pada tahun 2015 dan 2016 dikategorikan menguntungkan (<i>Favorable</i>) karna jumlah realisasi lebih sedikit dibandingkan dengan anggaran belanja daerah yang telah direncanakan, sehingga dapat dikatakan bahwa Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bombana telah mampu melakukan efisiensi biaya
3	Sugiyanta Jurnal Vol. 14 (2016)	Analisis belanja modal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia	Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal adalah Kemandirian Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Pegawai dan Silpa

4	Nadhirah Nagu Skripsi (2012)	Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat)	Hasil dari penelitian Anggaran telah berfungsi sebagai alat pengendalian belanja barang dan jasa pada tahun 2009. Hal ini dilihat dari hasil analisis yang menunjukkan penyimpangan anggaran masih dalam batas pengendalian yang dapat diterima. Anggaran telah digunakan sebagai pedoman kerja, perencanaan dan pengawasan kerja sehingga dihasilkan anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis
5	Lastowo Jurnal Vol 4 (2010)	Evaluasi Anggaran Belanja Sebagai Alat Pengendalian Keuangan (Studi Kasus Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia)	Hasil penelitian menunjukkan penyelenggaraan tugas pemerintahan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban Negara dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran Negara, yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan Negara. ANRI sebagai Lembaga Pemerintah memiliki tugas pokok pembinaan kearsipan secara nasional di bidang Pendidikan dan Pelatihan kearsipan yang diaplikasikan melalui Unit Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan (Pusdiklat ANRI).

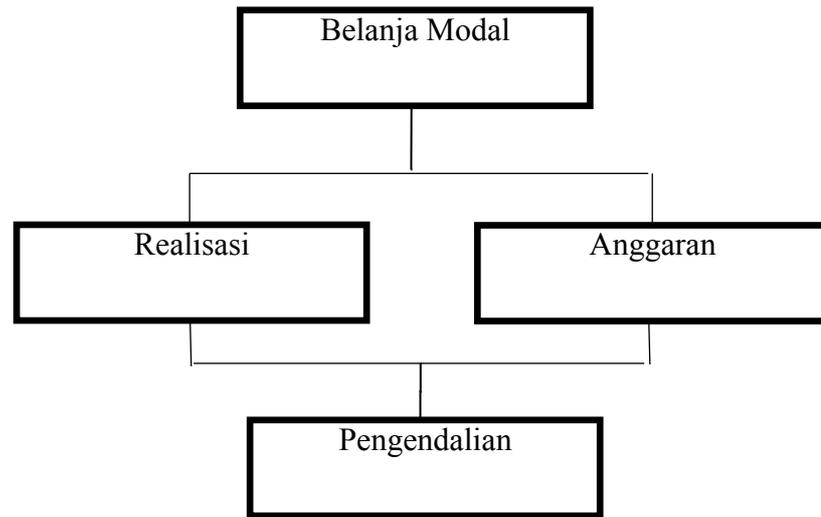
B. Kerangka Berfikir

Anggaran merupakan salah satu fungsi yang sering digunakan sebagai alat perencanaan, koordinasi dan pengendalian, karena jika anggaran disusun dengan tepat dan sistem pengawaasan yang baik akan mempermudah penilaian tingkat efisiensi setiap pekerjaan. Pengendalian berdasarkan anggaran dilakukan dengan membandingkan dengan anggaran dan realisasinya dari perbandingan tersebut dapat diketahui penyebab terjadinya penyimpangan antara anggaran dengan realisasinya.

Pengendalian merupakan kegiatan yang bertujuan agar strategis, kebijakan, program kerja, dan anggaran dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Artinya semua kegiatan harus diusahakan sekecil mungkin adanya penyimpangan. Pengendalian harus dilakukan sepanjang proses bisnis agar setiap penyimpangan yang terjadi dapat diatasi.

belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender

Kerangka berpikir merupakan kesimpulan dari uraian tinjauan teoritis yang diwujudkan dalam diagram gambar. Adapun kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian Deskriptif yang merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan di analisa agar memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2016, hal 147) Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

B. Definisi Operasional

Defenisi Operasional adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mendeteksi variabel-variabel dengan konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian dan untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian. Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian

Pengendalian merupakan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan dalam organisasi terhadap komponen organisasi dan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara terus menerus dan berkesinambungan agar semua dapat berfungsi secara maksimal sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan suatu pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga akan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu. Dalam hal tersebut masuk ke dalam pembukuan akuntansi dengan kata lain belanja modal akan mempengaruhi posisi keuangan.

3. Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua aktivitas perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada kantor Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No 5 Petisah Tengah Medan Petisah.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini direncanakan mulai pada bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019.

Tabel III.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																			
		November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■																			
2	Riset awal		■																		
3	Pembuatan proposal			■	■	■	■														
4	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■										
5	Seminar Proposal											■									
6	Riset												■	■							
7	Penyusunan Skripsi													■	■	■					
8	Bimbingan Skripsi																■	■	■		
9	Sidang Meja Hijau																			■	

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data Kualitatif dan Kuantitatif.

1. Data kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini data kuantitatifnya berupa data anggaran dan realisasi belanja modal pada Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Utara
2. Data kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi yang bersifat ilmiah. Data yang berupa wawancara pada Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Utara.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

1. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik berupa publikasi maupun data perusahaan sendiri, antara lain data mengenai sejarah ringkas, struktur organisasi, catatan dan sumber sumber

kepuustakaan. Data ini berupa Laporan data anggaran dan realisasi belanja daerah Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Utara

2. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian, guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian. Data ini berupa hasil wawancara dengan pegawai di Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi (*Documentation*)

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data anggaran dan realisasi belanja modal serta data yang berhubungan dengan penelitian. Data bersumber dari arsip, dokumen, dan laporan-laporan keuangan Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Utara.

2. Wawancara (*Interview*)

Yaitu dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pegawai kantor Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Utara. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan keterangan yang lengkap sesuai dengan judul penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2016, hal 147)

Analisis deskriptif merupakan suatu teknis analisis data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang telah ditentukan, kemudian mengelompokkannya, menginterpretasikan, dan menganalisis data serta dibandingkan dengan teori, sehingga dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas kemudian diambil satu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.
2. Menganalisis data anggaran dan realisasi belanja modal.
3. Melakukan wawancara.
4. Menganalisis penyebab terjadinya penurunan anggaran dan realisasi belanja modal pada Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Utara
5. Menganalisis anggaran belanja modal sebagai alat pengendalian pada Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Utara
6. Menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara tentang belanja modal baik berdasarkan dokumentasi maupun wawancara, penulis menemukan beberapa masalah yang harus dianalisis berupa :

a. Realisasi Belanja Modal Tidak Mencapai Anggaran yang Telah Di Tetapkan pada DPR Sumatera Utara.

Kinerja realisasi belanja modal memerlukan waktu pengrealisasiannya. Adapun rumus dari rasio efektivitas realisasi belanja modal adalah sebagai berikut.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Modal}}{\text{Anggaran Belanja Modal}} \times 100$$

Tabel IV.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pada DPR Sumatera Utara

Tahun	Anggara	Realisasi	Persentase
2014	6.405.406.250	5.532.630.000	86,37
2015	929.900.000	767.518.000	82.54
2016	13.239.590.000	1.618.568.887	12.23
2017	4.371.983.355	3.103.541.250	70.99

Sumber : DPR SUMUT

Adapun pengukuran nilai efektifitas secara lebih rinci berdasarkan kriteria kinerja keuangan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut:

Tabel IV.2
Interpensi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994

Berdasarkan dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran belanja modal selama periode 2014-2015 dapat di katakan cukup efektif, pada tahun 2016 dikatakan tidak efektif dan tahun 2017 berubah menjadi kurang efektif. Dimana dapat dilihat pada tahun 2014 anggaran sebesar Rp 6.405.406.250 dan realisasi sebesar Rp 5.532.630.00,dengan persentase 86,37% tahun 2015 anggaran di turunkan menjadi Rp 929.900.000 di ikuti oleh penurunan realisasi sebesar Rp 767.518.000, dengan persentase 82,54% tahun 2016 anggaran di naikkan menjadi Rp 13.139.590.355 dan diikuti oleh peningkatan realisasi sebesar Rp 1.618.568.887 dengan persentase 12.23% akan tetapi belum mencapai anggaran yang telah di tentukan, dan di tahun 2017 anggaran di turunkan menjadi Rp 4.371.983.355 dan ikuti oleh peningkatan realisasi sebesar Rp 3.103.541.250, dengan persentase 70,99%. dapat di lihat bahwa anggaran belanja modal yang dikeluarkan belum habis direalisasikan.

Berdasarkan data yang sudah di analisis realisasi anggaran belanja modal pada kator Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara belum mencapai target hal ini disebabkan oleh bebrapa kendala yang dihadapi, antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang staf keuangan pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara terkaid kendala yang dihadapi saat realisasi belanja modal adalah apabila ada rasionalisasi atau pengurangan anggaran untuk digeser ke anggaran berdasarkan kebijakan Pembrov-SU dalam hal ini kepala daerah.

b. Faktor Penyebab Realisasi Anggaran Belanja Modal Tidak Tercapai Pada DPR Sumatera Utara.

Berdasarkan data yang sudah di analisis realisasi anggaran belanja modal pada kator Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara belum mencapai target hal ini disebabkan oleh bebrapa faktor, antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang staf keuangan pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara terkaid faktor penyebab realisasi belanja modal tidak tercapai adalah terlambatnya pengesahaan perubahan APBD dimana banyak belanja yang ditampung pada P. APBD.

B. Pembahasan

1. Realisasi Belanja Modal Tidak Mencapai Anggaran yang Telah Di Tetapkan pada DPR Sumatera Utara.

Dalam melakukan anggaran pada belanja modal di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara melakukannya dengan membandingkan anggaran dan realisasi yang diperoleh pada tahun sebelumnya. Kemudian melakukan evaluasi target pada tahun berikutnya

Dimana dapat dilihat pada tahun 2014 anggaran sebesar Rp 6.405.406.250 dan realisasi sebesar Rp 5.532.630.00, dengan persentase 86,37% tahun 2015 anggaran di turunkan menjadi Rp 929.900.000 di ikuti oleh penurunan realisasi sebesar Rp 767.518.000, dengan persentase 82,54% tahun 2016 anggaran di naikan menjadi Rp 13.139.590.355 dan diikuti oleh peningkatan realisasi sebesar Rp 1.618.568.887 dengan persentase 12,23% akan tetapi belum mencapai anggaran yang telah di tentukan, dan di tahun 2017 anggaran di turunkan menjadi Rp 4.371.983.355 dan diikuti oleh peningkatan realisasi sebesar Rp 3.103.541.250, dengan persentase 70,99%. dapat di

lihat bahwa anggaran belanja modal yang dikeluarkan belum habis direalisasikan. Dan dari hasil perhitungan sebelumnya dapat dilihat bahwa realisasi anggaran belanja modal selama periode 2014-2015 dapat dikatakan cukup efektif, pada tahun 2016 dikatakan tidak efektif dan tahun 2017 berubah menjadi kurang efektif.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi belanja modal terhadap anggaran yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi belanja modal dimaksudkan agar mendorong kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara yang cukup tinggi.

Menurut Mardiasmo, (2013, hal. 106) menyatakan bahwa Kinerja Pemerintah daerah dinilai baik apabila jika realisasi belanja lebih rendah dari yang dianggarkan, maka hal itu mengidentifikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang baik. Pencapaian ini menunjukkan rasio belanja modal relative kecil dibandingkan dengan anggaran belanja modal. Ini menunjukkan bahwa dari total belanja modal yang dianggarkan tidak semua habis direalisasikan hal ini perbaikan yang harus dilakukan dalam Belanja Modal pada Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara perlu adanya penghematan dalam belanja modal, agar terhindar dari pemborosan penggunaan dana APBD

Proses penyusunan anggaran merupakan suatu kegiatan yang utuh dan terpadu yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara pada setiap tahun anggaran. Peraturan-peraturan pemerintah mengenai keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan makin informative.

Anggaran yang telah dibuat akan direalisasikan untuk satu tahun kedepannya, akan tetapi anggaran yang telah di buat untuk belanja modal tidak

semua habis direalisasikan hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara untuk merealisasikannya, dimana kendala tersebut di antaranya apabila ada rasionalisasi atau pengurangan anggaran untuk digeser ke anggaran berdasarkan kebijakan Pembrov-SU dalam hal ini kepala daerah.

Kendala yang dihadapi yang dihadapi Dewan perwakilan Rakyat Sumatera Utara tersebut menyebabkan realisasi anggaran belanja modal pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara tidak habis direalisasikan.

2. Faktor Penyebab Realisasi Anggaran Belanja Modal Tidak Tercapai Pada DPR Sumatera Utara

Dari data yang sudah dianalisis maka dapat dikatakan bahwa fungsi anggaran sebagai alat pengendalian belum dijalankan dengan baik sehingga realisasi anggaran belanja modal belum efektif, hal ini terlihat dari realisasi anggaran belanja modal pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara dimana tingkat realisasi penerimaannya belum mencapai 100%. hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah terlambatnya pengesahan perubahan APBD dimana banyak belanja yang ditampung pada P. APBD.

Menurut Mardiasmo, (2013, hal. 106) menyatakan bahwa Kinerja Pemerintah daerah dinilai baik apabila jika realisasi belanja lebih rendah dari yang dianggarkan, maka hal itu mengidentifikasi adanya kinerja anggaran yang kurang baik. Anggaran belanja modal dapat dijadikan sebagai alat pengendalian untuk mencapai tujuan yang diharapkan, disamping sebagai alat pengendalian, anggaran juga dijadikan sebagai pedoman kerja dan alat koordinasi bagi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara, untuk mencapai tujuan yang

diharapkan anggaran yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi belanja modal.

Selisih antara anggaran belanja modal dan realisasi belanja modal dianalisa lebih lanjut. Anggaran diperlukan oleh kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara sebagai alat pengendalian terhadap pelaksanaan (realisasi) dari rencana tersebut diwaktu yang akan datang. Dengan adanya anggaran maka kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara mempunyai tolak ukur untuk menilai realisasi kegiatan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara dengan membandingkan antara yang termuat dalam anggaran dengan realisasi kerja yang telah dilakukan sehingga dewan komisaris dapat menilai apakah manajemen telah bekerja dengan baik dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan operasi Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara.

Kegunaan anggaran belanj modal yang direncanakan Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara sebagai alat pengendalian diantaranya adalah:

- a. Berperan sebagai tolok ukur atau standar bagi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara
- b. Memberikan kesempatan untuk menilai dan mengevaluasi secara sistematis setiap segi atau aspek Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara

Bila menyusun anggaran belanja modal secara cermat dan baik akan mendatangkan manfaat-manfaat bagi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara sebagai berikut:

- a. Mendorong setiap individu yang tergabung dalam komite anggaran untuk berfikir kedepannya.

- b.** Mendorong terjadinya kerja sama antara masing-masing bagian karena menyadari mereka tidak dapat berdiri sendiri.
- c.** Mendorong adanya pelaksanaan atas asas partisipasi, karena setiap bagian terlibat untuk ikut serta memikirkan kerjanya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta hasil analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai Anggaran Belanja Modal Sebagai Alat Pengendalian Pada Kantor Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran belanja modal pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara belum habis di realisasikan dan kurang efektif.
2. Realisasi anggaran belanja modal pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara belum mencapai target hal ini disebabkan kendala yang dihadapi saat realisasi belanja modal adalah apabila ada rasionalisasi atau pengurangan anggaran untuk digeser ke anggaran berdasarkan kebijakan Pembrov-SU dalam hal ini kepala daerah.
3. Fungsi anggaran sebagai alat pengendalian belanja modal pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara belum dijalankan dengan baik hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah terlambatnya pengesahaan perubahan APBD dimana banyak belanja yang ditampung pada P. APBD.

B. Saran

Dalam upaya mensukseskan realisasi anggaran belanja modal pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara pada tahun yang akan datang penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan perencanaan anggaran belanja modal hendaknya pemerintah lebih bijak dalam melihat situasi yang sedang berjalan pada saat ini. Mengevaluasi informasi setiap tahunnya agar pemerintah dapat mempertimbangkan perencanaan pada anggaran belanja modal pada masa yang akan datang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara agar lebih efektif dalam merealisasikan anggaran belanja modal guna mendukung perekonomian.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara agar lebih menilai dan mengevaluasi secara sistematis setiap segi atau aspek yang di anggarkan.
4. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya menambah waktu penelitian dalam menganalisis Anggaran Belanja Modal Sebagai Alat Pengendalian supaya memperoleh hasil yang lebih maksimal

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu. (2015). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah & DIY. *JAAI*, Vol. 08, No. 2, pp.416-424.
- Abdul, Halim,dkk (2012). *Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Yogyakarta*
- Agustina, Rahmi., dan Sulaiman. (2013). Hubungan Motivasi dan Kepuasan Kerja dengan Kinerja Guru pada SMA Negeri di Kabupaten Pidie. *Sains Riset Volume 3 - No. 1, 2013, hlm. 1-10.*
- Catur Sasongko (2011), *Anggaran. Salemba empat, Jakarta.*
- Hansen dan Mowen. (2009). *Akuntansi Manajerial. Buku 2 Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.*
- Harahap, Sofyan Syafri. (2008). *Budgeting Penganggaran Perencanaan Lengkap. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*
- Lastowo Hendra (2010). Evaluasi Anggaran Belanja Sebagai Alat Pengendalian Keuangan (Studi Kasus Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia). *Jurnal Program Study Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. 2 (4). 1-20.*
- Liando, Grace Yunita (2016). “Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe”. *Jurnal Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol.4 No.1 Maret 2016*
- Pemerintah Republik Indonesia (2010) “Peraturan Pemerintah Nomor 71” Standart Akuntansi Pemerintahan. Jakarta. www.djpk.depkeu.go.id Diakses 22 Januari 2018
- Pemerintah Republik Indonesia (2011) “Kementrian Keuangan Republik Indonesia” Deskripsi dan Analisis Anggaran . Jakarta. www.djpk.depkeu.go.id Diakses 5 Maret 2018
- Pemerintah Republik Indonesia (1996) “Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327” Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta. www.kemendagri.go.id Diakses 7 Maret 2018
- Sari Ika Maya (2018).” Anggaran Belanja Daerah Sebagai Alat Pengendalian Pada Badan Pengolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bombana. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan. 1 (3). 122-135.*
- Rudianto. (2013). *Akuntansi Manajemen. Jakarta: Penerbit Erlangga.*

- Spiregar, Baldric, Bambang Suripto, Dodi Hapsori. dkk. (2013). Akuntansi Biaya. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyanta (2016). “Analisis belanja modal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember. 1 (14). 19-40.*
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Afabeta.
- Supriyono, R.A. (2013). Akuntansi Biaya : Perencanaan dan Pengendalian Biaya serta Pembuatan Keputusan. Edisi Kedua. Buku Kedua. BPFE: Yogyakarta
- Welsch, dkk. (2012). Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Laba. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : SRI HARTINAH
N.P.M : 1505170668
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Penelitian : ANALISIS ANGGARAN BELANJA MODAL SEBAGAI
ALAT PENGAWASAN PADA KANTOR DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT SUMATERA UTARA

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
11/12/18	Diterima penentuan judul		
	Diterima - Latar belakang masalah - teori, Daftar pustaka		
09/01/19	perbaiki		
	Diterima - Latar belakang masalah - teori - cara kutipan		
27/01/19	perbaiki		
	Diterima - Latar belakang masalah - cara kutipan dan penulisan		
	perbaiki 1		
	ACC seminar proposal		

Medan, Januari 2019

Pembimbing Proposal

(IKHSAN ABDULLAH, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : SRI HARTINAH
N.P.M : 1505170668
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Penelitian : ANALISIS ANGGARAN BELANJA MODAL SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN PADA KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SUMATERA UTARA

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
04-03-2019	Diterima - pembabasan - kesimpulan dan saran perbaiki!		
06-03-2019	Diterima - pembabasan di perdalam - kesimpulan dan saran perbaiki!		
07-03-2019	Diterima - Pembahasan - kesimpulan dan saran perbaiki!		
	Diterima - Kesimpulan - Pembahasan perbaiki!		
08-03-2019	Acc Mega hijau		

Pembimbing Skripsi

(IKHSAN ABDULLAH, S.E., M.Si)

Medan, Maret 2019

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si)



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
..... 20... M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamu'alaikum

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

S	R	I		H	A	R	T	I	N	A	H								
---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

NPM :

1	5	0	5	1	7	0	6	6	8										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat.Tgl. Lahir :

A	E	K		B	A	T	U		L	O	-	0	4	-	1	9	9	7	
---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa :

J	I		B	U	K	I	T		B	A	R	I	S	A	N		1		
6	6		B	U	N	G	A		N	U		2							

Tempat Penelitian :

S	E	K	R	E	T	A	R	I	A	T		D	E	W	A	N			
P	E	R	W	A	K	I	L	A	H		R	A	K	T	A	T			
D	A	E	R	A	H														

Alamat Penelitian :

J	I	N		I	M	A	M		B	O	N	J	O	L		N	O		5
M	E	D	A	N															

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

- 1. Transkrip nilai sementara
- 2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi
[Signature]
Fitriani Saragih, SE, MSi

Wassalam
Pemohon
[Signature]
SRIHARTINAH



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Imam Bonjol No. 5 Telp. (061) 4575001 - 4523043 Fax. (061) 4522270

M E D A N

Email : Humas.dprdsumut@gmail.com

Kode Pos 20112

Medan, 31 Januari 2019

Nomor : 257 /18/Sekr
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis UMSU
di-

M e d a n.

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Nomor : 301/II.3-AU/UMSU-05/F/2019 tanggal 18 Januari 2019 Perihal Izin
Riset, dengan ini memberikan Izin Kepada:

Nama : Sri Hartinah
N P M : 1505170668
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Akuntansi
Judul : Analisis Anggaran Belanja Modal Sebagai Alat
Pengendalian di Kantor Sekretariat DPRD Prov.Sumut

Untuk Melaksanakan Riset di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara,
dengan ketentuan mematuhi segala peraturan yang berlaku di Sekretariat DPRD
Provinsi Sumatera Utara.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

a.n SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
KASUBBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN



Hj. TINI
PENATA TK. I
NIP. 19640312 198509 2 001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Imam Bonjol No. 5 Telp. (061) 4575001 - 4523043 Fax. (061) 4522270

M E D A N

sumut@gmail.com

Kode Pos 20112

SURAT KETERANGAN

Nomor : 599 /18/Sekr

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan ini
mengatakan bahwa Mahasiswa/i tersebut di bawah ini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu :

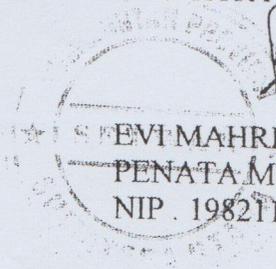
Nama : Sri Hartinah
NPM : 1505170668
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Akuntansi

selesai melaksanakan Riset di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara
Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 01 Maret 2019

a.n. SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Plh. KASUBBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN


EVI MAHRINA SIREGAR, A.Md
PENATA MUDA TK. I
NIP. 19821118 200504 2 001

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari
Senin, 11 Februari 2019 menerangkan bahwa:

Nama : SRI HARTINAH

N.P.M. : 1505170668

Tempat / Tgl.Lahir : AEK BATU , 10 APRIL 1997

Mamat Rumah : JL.BUKIT BARISAN I

JudulProposal : ANALISIS ANGGARAN BELANJA MODAL SEBAGAI ALAT
PENGENDALIAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA
KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SUMATERA UTARA

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan
pembimbing : *ikhсан Abdullah, SE, M.H. 19/2-2019*

Medan, 11 Februari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si

Pembanding

DR.HJ.MAYA SARI, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini **Senin, 11 Februari 2019** telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi dengan agenda sebagai berikut :

Nama : SRI HARTINAH
N.P.M. : 1505170668
Tempat / Tgl.Lahir : AEK BATU , 10 APRIL 1997
Alamat Rumah : JL.BUKIT BARISAN I
JudulProposal : ANALISIS ANGGARAN BELANJA MODAL SEBAGAI ALAT
 PENGENDALIAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SUMATERA UTARA

(Disetujui / tidak disetujui *)

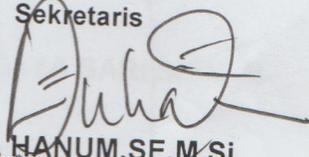
No	Komentar
	dikempurnakan
	- l. belakaang masalah - kepelele of - kep mendingri y baru
	- rca - penel hr kedahl - kemuglee buphor
	- Depent dperhor
	kremall penult
Pembetulan	Perbaikan Minor <input checked="" type="radio"/> Perbaikan Mayor Seminar Ulang

Medan, 11 Februari 2019

TIM SEMINAR

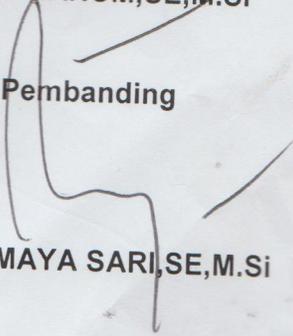
Ketua

 FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

 ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

 IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si

Pembanding

 DR. HJ. MAYA SARI, SE, M.Si

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI HARTINAH
NPM : 1505170668
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, 16 Maret 2019
Saya yang menyatakan



SRI HARTINAH



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Imam Bonjol No. 5 Telp. (061) 4575001 - 4523043 Fax. (061) 4522270

M E D A N

Email : Humas.dprdsulut@gmail.com

Kode Pos 20112

SURAT KETERANGAN

Nomor : 599 /18/Sekr

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa/i tersebut di bawah ini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu :

Nama : Sri Hartinah
NPM : 1505170668
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Akuntansi

Telah selesai melaksanakan Riset di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara
Jln. Imam Bonjol No. 5 Medan.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 01 Maret 2019

a.n. SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Plh. KASUBBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN



SEVI MAHRINA SIREGAR, A.Md
PENATA MUDA TK.I
NIP . 19821118 200504 2 001